**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang paling sarat akan konflik dibandingkan dengan kawasan lain. Negara-negara Arab di kawasan ini sering terlibat konflik, baik itu konflik internal maupun konflik dengan negara lain yang berakibat pada terpecahnya negara-negara Arab dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan pengaruh mereka masing-masing. Negara-negara Arab cenderung untuk saling intervensi dikarenakan kepentingan yang saling bertabrakan satu sama lain.

Pasca runtuhnya rezim Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia dan kemudian diktator Husni Mubarak di Mesir, revolusi pun mulai merambat ke negara-negara lain di Timur Tengah. Sesudah sebelumnya rezim Tunisia runtuh, tidak lama setelah Zine El Abidin Ben Ali meninggalkan negerinya, kemudian terjadi “ revolusi “ Mesir yang berakhir dengan turunnya Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 32 tahun.

Peristiwa yang terjadi di negara-negara Arab seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir itu, memberikan inspirasi bagi generasi muda Bahrain yang mendorong pemerintahan Bahrain agar membuka diri dengan perubahan yang ada karena mereka menginginkan perubahan. Pada Februari 2011, ribuan demonstran berkumpul di Bundaran Mutiara di ibukota Manama dan menuntut kesetaraan dan kebebasan bagi mayoritas Syiah. Mereka menyerukan untuk mengadopsi konstitusi baru dan investigasi korupsi politik dan ekonomi dan langkah-langkah keamanan yang menindas. Kemudian mereka juga meminta keluarga kerajaan menyerahkan kekuasaan kepada sebuah pemerintah baru yang terpilih. Diikuti dengan terjadinya kekerasan, kelompok oposisi meningkatkan tuntutan dan akhir yang lengkap untuk monarki.[[1]](#footnote-1) Negara berpenduduk mayoritas Syiah tersebut berada pada titik akumulasi ketidakpuasan rakyat yang hidup dalam tekanan oleh kekuaaan dengan sistem monarki despotik.

Aksi protes yang terjadi di Bahrain ini membuat pemerintah Arab Saudi merasa khawatir dan meminta kepada Bahrain agar terus menekan kebangkitan rakyatnya, karena menurut keyakinan keluarga kerajaan Saudi, kebangkitan rakyat Bahrain dapat dikatakan sebagai benteng pertama untuk menghadapi kebangkitan rakyat. Jika rezim Bahrain gagal membendung kebangkitan rakyatnya, maka Arab Saudi juga akan terancam menjadi sasaran berikutnya.[[2]](#footnote-2)

Konflik yang terjadi di Bahrain berkaitan dengan dua hal utama, yaitu struktur masyarakat dan sistem politik yang tidak demokratis. Struktur masyarakat di Bahrain terdiri dari dua etnis besar yakni Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Bahrain adalah Syiah dan mereka diatur oleh sebuah monarki Sunni dengan sejarah panjang diskriminasi. Terbukti bahwa sangat sedikit kaum Syiah yang terdapat di kalangan tentara dan polisi, mereka menderita pengangguran yang tidak proporsional dan kurang mendapat akses ke dalam pemerintahan.

Ketegangan antara kelompok Islam Syiah dan Sunni memang sudah lama terjadi di Bahrain, bahkan telah terjadi jauh sebelum ‘negara mengapung’ di Teluk Persia itu merdeka. Komposisi demografis sekte dan politik di negara itu memang tidak sejalan. Kalangan Syiah merupakan mayoritas di Bahrain namun justru terpinggirkan, sementara kalangan Sunni yang penduduknya hanya sekitar 30% diantara mereka menjadi penguasa.[[3]](#footnote-3) Warga Sunni juga memiliki akses seluas-luasnya ke berbagai sektor strategis di pemerintahan. Anomali dan diskriminasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyediakan kondisi bagi lahirnya protes rakyat.

Selain struktur masyarakat tersebut, variabel determinan yang turut mempengaruhi ialah sistem politik di Bahrain yang diskriminatif, yakni sistem politik yang memungkinkan elit politik terdiri dari minoritas ( Sunni ) yang terkenal korup, nepotisme, dan tidak demokratis. Pemerintah Bahrain selama bertahun-tahun selalu dilanda protes demonstran dari mayoritas Syiah. Diskriminasi yang terjadi dalam sistem politik di Bahrain merupakan strategi pemerintah yang dipegang oleh Sunni untuk menghalangi Syiah mendapatkan kebebasan politik yang sama. Salah satu hal yang paling terlihat dari diskriminasi ini adalah orang-orang Syiah selalu dihalangi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor strategis birokrasi dan pemerintahan.

Selama bertahun-tahun telah terjadi kerusuhan periodik. Pada Maret 2011 sebagai represi kekerasan oleh monarki Sunni di Bahrain telah diintensifkan. Syiah telah radikal, bergerak melampaui permintaan untuk reformasi konstitusi ke salah satu perubahan rezim.[[4]](#footnote-4)

Bahrain secara geografis memiliki wilayah yang terpisah dengan daratan Arab oleh Teluk Persia. Konstelasi geopolitik yang terjadi di Bahrain lebih banyak didominasi oleh faktor internal negaranya, yaitu konfrontasi Sunni dan Syiah yang hampir di semua lini. Dalam hal ini Iran sebagai salah satu negara tetangga Bahrain mengklaim atas wilayah Bahrain sebagai wilayahnya. Terlebih lagi dengan adanya upaya Syiah untuk membangun “ *Syiah Empire “* yang merupakan etnis mayoritas Iran untuk menjadi dominan di Bahrain. Sementara itu Arab Saudi dan Negara-Negara Jazirah Arab lainnya berusaha untuk menghalangi upaya Syiah ini.

Hal ini menjadi semakin pelik jika dibawa ke logika geopolitik yang lebih besar. Bahrain, bagi Inggris dan Amerika Serikat merupakan aset yang sangat berharga, mengingat posisi geografis Bahrain di tengah Teluk Persia yang sangat menguntungkan. Bahrain dengan kedua negara tersebut telah menyepakati kerjasama militer, sehingga baik Inggris maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki pangkalan militer di wilayah Bahrain. Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan negara aliansi Arab Saudi jelas tidak menginginkan Syiah yang didukung oleh Iran sebagai rival mengambil alih kendali terhadap pemerintahan Bahrain, meskipun pemerintahan Sunni sarat denga praktik korupsim kolusi dan nepotisme. Jatuhnya Bahrain ke tangan Syiah dianggap sebagai ancaman bagi Negara-Negara dominasi Sunni di sekitarnya, seperti Qatar, Kuwait, Emirat, Oman dan semua Negara-Negara Teluk lainnya.

Aksi protes rakyat yang dikesankan sebagai perseteruan antara muslim Sunni dan Syiah tersebut memang memiliki beberapa elemen dan materi yang memungkinkan untuk dimainkan. Mayoritas rakyat Bahrain adalah Syiah, dan minoritas Sunni di Arab Saudi juga tengah melakukan aksi protes terhadap pemerintahannya. Monarki Bahrain dan Arab Saudi sama-sama dipegang oleh muslim Sunni. Sementara itu Iran yang berada di kawasan Teluk Persia adalah negara islam yang bermazhab Syiah. Faktor-faktor ini telah menyediakan ruang dan materi untuk mencitrakan aksi protes rakyat atas sistem monarki yang menindas, menjadi konflik yang didasarkan atas perbedaan mazhab dalam Islam.

Kendali kekuasaan monarki Bahrain dipegang oleh muslim Sunni ( minoritas ) yang telah berlangsung selama 230 tahun. Negara yang merupakan sebuah monarki sokongan barat – Amerika Serikat dan Arab Saudi khususnya, tidak pernah memberi ruang bagi rakyat mayoritas yaitu Syiah untuk terlibat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Bahkan kanal-kanal penyaluran aspirasi politik mereka tidak pernah dibiarkan tumbuh dan senantiasa berada dalam tekanan. Dengan munculnya arus revolusi yang menyebar luas di kawasan Timur Tengah, turut pula memicu bangkitnya rakyat Bahrain dalam upaya untuk melepaskan diri dari tekanan dan diskriminasi yang selama ini mereka alami.

Arab Saudi dan Bahrain adalah dua Negara di timur tengah yang memiliki hubungan politik dan ekonomi yang sangat kuat. Arab Saudi adalah penyokong dana terbesar bagi Bahrain. Mayoritas komunitas Syiah Saudi di wilayah Al Sharqiyah juga memiliki ikatan kekeluargaan dengan Syiah Bahrain. Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi Riyadh terhadap peningkatan aksi protes rakyat yang juga terjadi di Saudi. Namun demikian faktor bangkitnya protes anti pemerintah di Bahrain bukanlah hanya dikarenakan friksi dan konflik antara Sunni dan Syiah. Namun hal ini terjadi diakibatkan oleh tekanan dan diskriminasi yang mereka alami di bawah pemerintahan monarki. Demikian juga alasan aksi protes yang terjadi di wilayah komunitas Syiah di Arab Saudi.

Sejak awal tahun 2011 rakyat Bahrain melancarkan aksi protes damai secara besar-besaran. Para pendemo berkonsentrasi dan mendirikan perkemahan di Gundaran ( tugu ) Mutiara, Manama sejak 14 Februari 2011. Mereka mendesak pembubaran sistem monarki dan perubahan konstitusi negara demi masa depan Bahrain yang lebih baik. Para demonstran juga menuntut pembebasan tahanan politik dan aktivis sosial, penghapusan diskriminasi dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Bahrain baik Sunni maupun Syiah.[[5]](#footnote-5)

Pemerintah Bahrain dan kelompok pilitik Syiah mencoba untuk mengembangkan dialog politik. Raja Bahrain telah menawarkan dialog dan sebuah parlemen baru yang lebih kuat dan reformasi lainnya, namun pihak oposisi telah menolak untuk duduk dan berbicara sampai pemerintah mengundurkan diri.[[6]](#footnote-6)

Pada tanggal 13 Maret 2011, aksi protes meletus, tepatnya di Manama ketika Syiah mencoba untuk memblokir distrik keuangan dan juga mengganggu operasi sektor perbankan substansial Bahrain. Syiah Bahrain yang menghuni lebih dari setengah pulau itu diperkirakan 600.000 warga, telah frustrasi oleh keluarga Al-Khalifa yang berkuasa. Hingga Maret 2011, Raja Hamad Bin Isa Al-Khalifa secara efektif dalam kendali penuh dalam pemerintahan dan didukung oleh putranya, Sheikh Salman yang dipandang sebagai korup. Delapan anggota lain dari keluarga Al-Khalifa memegang portofolio dalam kabinet, termasuk tanggung jawab untuk urusan luar negeri, pertahanan dan keuangan. Parlemen bikameral memiliki majelis tinggi yang dibentuk oleh raja dan majelis rendah terpilih tetap dimiliki oleh mayoritas Sunni, dicapai oleh districting yang mendiskriminasikan Syiah.[[7]](#footnote-7)

Fenomena protes damai rakyat Bahrain dicitrakan sebagai gerakan kemazhaban akibat friksi yang terjadi antara Sunni dan Syiah. Iran sebagai negara Islam yang bermazhab Syiah tentunya diklaim sebagai penyokong utama demi memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Hubungan Iran dengan mayoritas rakyat Bahrain sangat dekat,mereka sama-sama penganut Syiah. Pencitraan ini sepertinya hendak melegitimasi respon keras pemerintah atas pendemo dan justifikasi keterlibatan para militer dalam skema Dewan Kerjasama Teluk. GCC ( *Gulf Cooperation Council )* adalah dewan kerjasama Teluk yang terbentuk dari enam Negara Teluk yaitu Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman dan Qatar. Aliansi tersebut bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi dan keaamanan antara negara anggota GCC.[[8]](#footnote-8) Keterlibatan pasukan GCC di Bahrain adalah untuk melindungi fasilitas-fasilitas strategis dan juga membantu mempertahankan ketertiban dan hukum.

Meletusnya aksi protes rakyat di Manama ini membuat Arab Saudi semakin merasa khawatir. Karena jika hal ini tidak segera dihentikan, maka dapat dipastikan pemerintahan Bahrain yang dipegang dan dikuasai oleh Sunni akan segera berakhir dan pemerintah akan segera terguling. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah yang selama ini dikuasai oleh Sunni kemungkinan akan jatuh dan diambil alih oleh Syiah. Oleh karena itu, Arab Saudi sebagai salah satu negara yang sangat tidak ingin pemerintahan Sunni di Bahrain terguling berupaya mengambil langkah-langkah kebijakan dalam upayanya untuk membantu pemerintah Bahrain untuk meredam aksi protes rakyat yang semakin lama semakin meningkat di Bahrain, dan juga tentu saja membantu mempertahankan eksistensi Sunni di Bahrain agar tetap berkuasa dalam pemerintahan Bahrain.

1. **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada kajian diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Arab Saudi dengan Negara negara timur tengah terutama dengan Bahrain dan Iran?
2. Bagaimana terjadinya gerakan reformasi di Bahrain ?
3. Bagaimana intervensi Arab Saudi terhadap gerakan reformasi di Bahrain ?
4. **Pembatasan Masalah**

Karena masalah yang di teliti cukup luas/kompleks, maka peneliti membatasi masalah pada faktor – faktor yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi untuk meredam gerakan reformasi di Bahrain.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalah yang telah dipilih dan merupakan *research problem,* maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Mengapa Arab Saudi melakukan intervensi untuk meredam gerakan reformasi di Bahrain ? “

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya gerakan reformasi di Bahrain.
4. Untuk mempelajari, mengamati, dan mengetahui bagaimana hubungan antara Arab Saudi dan Negara – Negara lain di timur tengah, terutama Bahrain.
5. Untuk memahami dan menganalisis bagaiamana intervensi Arab Saudi terhadap gerakan reformasi di Bahrain.
6. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan data dan hasil pengolahan data yang diperoleh sesuai tujuan penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini diharapkan :

1. Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teoritis maupun praktis bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Untuk memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah diatas tersebut dan menjadikan tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai intervensi Arab Saudi dalam meredam gerakan reformasi di Bahrain.
3. Dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi pembendaharaan dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana S1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teoritis**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penulis mengutip teori atau pendapat para ahli yang memiliki korelasitas dengan objek yang diteliti untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam penelitian sehingga diakui kebenarannya. Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti, diperlukan teori teori dan konsep ilmiah yang mampu mengarahkan penulis menemukan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interprestasi nantinya. Kerangka teoritis adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli, atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya, yang dirangkaikan sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis minor yaitu teori yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembahasan.

Dalam bentuk klasiknya Hubungan Internasional adalah hubungan antar Negara. Pada awal proses perkembangannya, ada yang berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar Negara. Menurut Mochtar Mas’oed dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Hubungan Internasional” : Disiplin dan Metodologi”,* yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Pewita dan Yanyan Mochamad Yani, mengatakan bahwa :

“ Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa actor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi Negara – Negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor Negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional. “[[9]](#footnote-9)

Studi hubungan internasional mencakup seluruh disiplin ilmu dan bersifat luas dan umum, sehingga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner, artinya disiplin ilmu hubungan internasional sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Menurut Trygve Mathisen dalam bukunya yang berjudul “ *Methodology in the Study of International Relations “*, yang dikutip oleh Soewardi Wiraatmadja mengatakan bahwa :

“ Hubungan Internasional juga dapat dikatakan sebagai Ilmu yang mempelajari seluruh aspek kehidupan social manusia, dalam arti semua tingkah laku yang terjadi atau berasal dari suatu Negara yang berpengaruh dan dipengaruhi tingkah laku manusia dari Negara lain.”[[10]](#footnote-10)

Dalam menjalankan setiap kegiatan aspek yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu Negara, akan selalu berkaitan dengan kedaulatan tinggi suatu Negara serta kepentingan – kepentingan nasional ( *national interests* ).

Dalam konteks kepentingan nasional, Michael G. Roskin menyebutkan ada dua tingkatan dalam kepentingan nasional, yaitu kepentingan nasional yang bersifat *tetap* dan kepentingan nasional yang bersifat *aktual.* Kepentingan nasional yang bersifat tetap adalah sebuah kepentingan Negara merdeka untuk saling melindungi institusi-institusi Negara, rakyat, dan nilai-nilai dasarnya. Sedangkan kepentingan nasional yang aktual adalah segala kepentingan yang tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan sebuah Negara.[[11]](#footnote-11)

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penulis menggunakan teori politik luar negeri, konsep kepentingan nasional dan konsep intervensi. Ketiga pendekatan ini dipilih karena menurut penulis ketiga pendekatan ini mampu menjawab berbagai dinamika tentang hal yang menyebabkan Arab Saudi melakukan intervensi terhadap Bahrain dalam upaya meredam gerakan reformasi di Bahrain. Gambaran tentang hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy)***

Menurut Jack Plano dan Roy Olton, *Foreign Policy* adalah sebuah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh *decision maker* dari sebuah negara terhadap negara lain atau unit-unit internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional.[[12]](#footnote-12) Teori politik luar negeri adalah teori yang menjelaskan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya.[[13]](#footnote-13) Dalam hubungannya dengan negara lain, politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus.

Analisa kebijakan luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan politik luar negeri mencari jawaban atas pertanyaan “*bagaimana* dan *“mengapa”* suatu rangkaian tindakan dilakukan. Politik Internasional berurusan dengan konsekuensi pertentangan politik luar negeri di lingkungan dunia yang kompetitif ini.

Politik luar negeri digambarkan sebagai penghubung antara lingkungan domestik dan lingkungan eksternal suatu negara.

**2. Konsep Kepentingan Nasional**

Setiap pengambilan kebijakan luar negeri, suatu negara senantiasa mendasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional seringkali dipakai sebagai alat untuk menganalisa untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional dalam dua aspek, yakni normatif dan deskriptif.

Secara normatif, konsep kepentingan nasional mengacu pada serangkain tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam hubungannya dengan negara lain. Secara deskriptif, konsep kepentingan nasional dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih.

Menurut Donald E Nuckertlein, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.[[14]](#footnote-14) Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ( survival ), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keaamanan militer, politik dan ekonomi.

Disamping itu Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pemandu pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya ada 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut [[15]](#footnote-15) :

1. *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri ( *Self Preservation* ) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lainm sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. *Independence* yang berarti mandiri, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik kedalam maupun keluar, militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.

3. *Military Security,* keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk mempertahankan atau menjaga keamanan territorial dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya.

4. *Territory Integrity,* yaitu kepentingan nasional untuk mengamankan daerah teritorinya dan sumber daya yang berada dalam daerah teritori sebuah negara, tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

5. *Economic Well Being* tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negar lain, misalnya minyak dan gas untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Dari kelima kategori umum yang dijabarkan oleh Jack C. Plano diatas, penulis beranggapan bahwa *Self Preservation, Military Security* dan *Terrritory Integrity* adalah unsur yang sesuai untuk diaplikasikan pada pembahasan mengenai Intervensi yang dilakukan Arab Saudi terhadap Bahrain dalam upaya meredam gerakan reformasi di Bahrain.

Salah satu faktor Arab Saudi melakukan intervensi dalam meredam aksi protes rakyat di Bahrain adalah untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan Timur Tengah dan juga mempertahankan eksistensi kaum Sunni dalam pemerintahan. Seperti yang diketahui bahwa Bahrain adalah negara yang pemerintahannya dikuasai oleh kaum Sunni, meskipun mayoritas penduduk Bahrain adalah Syiah. Begitu juga dengan Arab Saudi, negara ini juga dipimpim oleh kaum Sunni. Namun bedanya adalah Syiah di Arab Saudi merupakan minoritas tidak seperti yang ada di Bahrain. Hubungan Arab Saudi dengan Bahrain sangat baik, karena Bahrain merupakan salah satu sekutu ataupun negara aliansi Arab Saudi di kawasan Timur Tengah.

Terjadinya aksi protes rakyat di Bahrain yang mayoritas merupakan kaum Syiah dapat mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Sunni di Bahrain. Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah Bahrain akan diambil alih oleh Syiah. Hal ini tentu saja tidak dinginkan oleh Arab Saudi, karena Syiah di Bahrain memiliki hubungan yang erat dengan Iran karena Iran juga merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Syiah dan juga dipimpin oleh Syiah. Jika pemerintahan Bahrain terguling dan jatuh ke tangan Syiah maka hubungan Arab Saudi dengan Bahrain akan menjadi berubah. Karena Bahrain yang berada dibawah pimpinan Sunni adalah negara aliansi Arab Saudi. Sementara Syiah sangat dekat dengan Iran yang merupakan musuh atau oposisi dari Arab Saudi. Jika Bahrain jatuh maka ancaman Syiah sudah di depan mata bagi Arab Saudi, karena Bahrain akan menjadi Negara Syiah dan dengan sendirinya akan menjadi sekutu Iran. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Arab Saudi. Jika hal itu terjadi, Syiah akan menjadi kekuatan politik baru di Bahrain dan kejatuhan Bahrain ini juga akan menimbulkan “*efek domino”* bagi Qatar, Kuwait, Emirat, Oman, dan semua Negara-Negara Teluk akan jatuh ke tangan Syiah.[[16]](#footnote-16)

Dengan turut campur tangan di Bahrain, Saudi juga berharap untuk mampu menahan pemberontakan demokrasi di Negara-Negara Teluk dan memperjelas kepada penguasa mereka untuk tidak menyerah pada tuntutan gerakan tersebut. Karena penyebaran pasukan Saudi beserta pasukan keamanan GCC di Bahrain itu memposisikan semua penguasa Teluk pada kamp menentang reformasi demokrasi Arab.

Faktor lain dibalik intervensi Arab Saudi terhadap Bahrain dalam meredam gerakan reformasi di Bahrain adalah untuk mencegah minoritas Syiah di Arab Saudi agar pergolakan yang terjadi di Bahrain tidak meluas ke Saudi. Karena jika hal itu terjadi maka wilayah provinsi timur yang merupakan salah satu sumber kekayaan Saudi akan menjadi terancam.[[17]](#footnote-17) Provinsi sebelah timur Arab Saudi merupakan daerah yang kaya akan minyak dan letaknya berbatasan dengan Bahrain, sangat dekat dan dapat terhubung melalui jalan lintas. Di provinsi timur tersebut merupakan tempat tinggal kaum minoritas Syiah di Saudi. Arab Saudi khawatir jika penguasa Bahrain memenuhi tuntutan demonstran ( mayoritas Syiah ) untuk mengakhiri diskriminasi dan pembagian kekuasaan, maka minoritas Syiah di provinsi timur Arab Saudi itu juga akan menekan hak-hak mereka. Jika hal itu sampai terjadim tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi Arab Saudi karena harus kehilangan kekuasaan atas wilayah yang merupakan salah satu sumber kekayaan negaranya.

Selain itu intervensi yang dilakukan Arab Saudi terkait dengan isu keamanan. Letak negara Bahrain yang strategis di kawasan Timur Tengah sangat menguntungkan bagi Saudi dan juga negara aliansinya yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara ini telah menyepakati kerjasama militer dengan Bahrain. Amerika dan Inggris sama-sama memiliki pangkalan militer di wilayah Bahrain. Hal ini membuat Arab Saudi mendapat dukungan dari gedung putih untuk menumpas kebangkitan rakyat Bahrain. Terlebih lagi karena adanya armada kelima Amerika yang berada di Bahrain. Artinya jika terjadi perubahan kekuasaan di Bahrain maka akan membahayakan posisi militer Amerika di Teluk Persia dan Laut Oman.[[18]](#footnote-18) Jika pemerintahan Sunni di Bahrain berhasil dilengserkan, maka Syiah akan menjadi penguasa baru di Bahrain dan dengan sendirinya akan menjadi sekutu Iran. Hal ini tentu saja memberi ancaman keamanan bagi Arab Saudi dan juga negara-negara aliansinya yang lain.

3. Konsep Intervensi

Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara kedua pihak (orang, golongan atau negara). Dalam hal ini intervensi dapat diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Lauterpacht dalam Huala Adolf memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktaktor oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan,situasi, atau barang di negara tersebut.[[19]](#footnote-19)

Lebih jauh J. G. Starke dalam Huala Adolf menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Intervensi internal, yaitu campur tangan negara lain terhadap sengketa yang terjadi di dalam negeri suatu negara. Misalnya terjadi sengketa dalam negeri suatu negara antara pemerintah dan pemberontak, kemudian ada negara lain yang melakukan campur tangan atas sengketa tersebut.

b. Intervensi eksternal, yaitu campur tangan suatu negara atas sengketa yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain. Contohnya ketika Italy melibatkan diri dalam perang dunia II dengan memihak Jerman dan memerangi Inggris.

c. Intervensi Punitif adalah campur tangan suatu negara dalam bentuk tindakan membalas tanpa berperang akibat kerugian yang ditimbulkan negara lain. Sebagai contoh adalah blokade damai yang dilancarkan terhadap suatu negara sebagai balasan atas tindakan negara tersebut yang melanggar perjanjian.[[20]](#footnote-20)

1. **Hipotesis**

Dari asumsi-asumsi diatas penulis membangun hipotesis sebagai berikut : **“Jika gerakan reformasi di Bahrain terus berlangsung dan para demostran berhasil menuntut turun raja Bahrain, maka hal ini akan merambat ke Arab Saudi dan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di Arab Saudi “**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis ( Teoritis )** | **Indikator ( Empirik )** | **Verivikasi ( Analisis )** |
| **Variabel Bebas :**  Konflik yang terjadi di Bahrain memicu rakyat Bahrain melakukan demonstrasi untuk menuntut diadakannya reformasi di Bahrain | 1.Diskriminasi Sunni terhadap Syiah mengakibatkan Syiah tidak mendapatkan akses untuk terlibat dalam pemerintahan.  2.Adanya campur tangan Iran dengan ideologi revolusi Syiah menjadi salah satu intervensi yang terjadi dalam konflik di Bahrain. | 1.Adanya data (fakta) terkait diskriminasi Sunni yang memegang pemerintahan terhadap Syiah.  2.Adanya data (fakta) mengenai upaya Syiah untuk membangun “Syiah Empire” |
| **Variabel Terikat :**  Kepentingan Arab Saudi mencegah terjadinya reformasi pemerintahan Bahrain yang dipimpin oleh Sunni. | 1.Adanya Kepentingan Arab Saudi Untuk Menekan Ancaman Syiah  dan Mempertahankan Eksistensi Sunni di Bahrain  2. Adanya ancamanan syiah di provinsi timur Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Bahrain. | 1.Adanya data (fakta) upaya Syiah membangun “Syiah Empire”  2.Adanya data (fakta) provinsi timur Arab Saudi sebagai salah satu sumber kekayaan Arab Saudi |

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasionis, dimana dampak dari gerakan reformasi yang terjadi di Bahrain sebagai unit eksplanasi independen berpengaruh atau berdampak pada Arab Saudi.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan meneliti data-data yang bersifat non angka sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ( penggambaran ) yang berupa data-data tertulis. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang secara holistik ( utuh ).[[21]](#footnote-21) Penggunana analisis secara induktif lebih cepat menemukan fakta yang tetap dalam data, lebih memperlihatkan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan antara variabel. Selain itu analisis demikian dapat memperhitungkan hubungan antara variabel. Selain itu analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara ekplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dengan demikian dapat ditarik antara data dan variabel yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yan digunakan untuk penyusunan skripsi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) dimana data yang diperoleh untuk melengkapi penulis menyelesaikan skripsi ini berasal dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, internet dan data-data tertulis lainnya.[[22]](#footnote-22)

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data serta keterangan yang dibutuhkan, penulis mendatangi lembaga-lembaga seperti :

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan Bandung.
4. **Lama Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai bulan Februari 2016.

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, argumen pokok, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II HUBUNGAN ARAB SAUDI DENGAN BAHRAIN DAN IRAN TERKAIT GERAKAN REFORMASI DI BAHRAIN**

Bab ini berisi tentang hubungan Arab Saudi dengan Bahrain dan Iran terkait intervensi Arab Saudi dalam gerakan reformasi rakyat di Bahrain.

**BAB III AWAL TERJADINYA GERAKAN REFORMASI DI BAHRAIN**

Bab ini berisi pembahasan tentang awal terjadinya gerakan reformasi di Bahrain hingga turut terlibatnya Arab Saudi dalam meredam gerakan reformasi di Bahrain

**BAB IV ANALISIS INTERVENSI ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN REFORMASI DI BAHRAIN YAITU MENGENAI *SELF PRESERVATION,* *MILITARY SECURITY* DAN *TERRITORY INTEGRITY***

Bab ini berisi pembahasan tentang alasan dan faktor-faktor yang melatar belakangi Arab Saudi melakukan intervensi terhadap gerakan reformasi di Bahrain yaitu mengenai *Self Preservation, Military Security* dan *Territory integrity.*

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini membahas kesimpulan logis dari keseluruhan analisa permasalahan dari bab-bab sebelumnya.

1. Efraim Inbar, *The Arab Spring, Democracy and Security*, Rouletge, New York, 2013,hal 57. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Security Forces Smash Shi’ite Protest in Bahrain”

   <http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2011/03/mil-110316-rferl04.htm> , diakses pada 24 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Bahrain : Revolusi atau Intervensi“

   <http://islamicunderstanding.wordpress.com/2011/10/08/bahrain-revolusi-atau-intervensi/> , diakses pada 24 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. “The Saudi Intervention in Bahrain will fuel Sectarianism, notstifle it“, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/20/bahrain-saudi-intervention-religious-divide> , diakses pada 24 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Pendemo Bahrain menginap di pusat kota”, <http://www.bbc-now.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_bahrainunrest.shtml> , diakses pada 25 juli 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Intervensi Pasukan Arab Saudi Warnai Protes Bahrain”, <http://www.suaramedia.com/timur-tengah/2011/03/15/intervensi-pasukan-arab-saudi-warnai-protes-bahrain> , diakses pada 25 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Bahrain’s Crisis : Saudi Forces Intervene”, <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/bahrains-crisis-saudi-forces-intervene> , diakses pada 1 Agustus 2015. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Intervensi Pasukan Arab Saudi Warnai Protes Bahrain”, <http://www.suaramedia.com/timur-tengah/2011/03/15/intervensi-pasukan-arab-saudi-warnai-protes-bahrain> , diakses pada 1 Agustus 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. Anak Agung Banyu Pewita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* ( PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005 ), hal.4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soewardi Wiraatmadja, Diktata Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas. [↑](#footnote-ref-10)
11. Michael G Roskin, “National Interest: From Abstraction to Strategy” dalam Parameters, Vol.XXIV, No. 4, Winter, 1994-1995, hal 7 ; lihat juga dalam P.H. Liotta, Strategy and Force Planning, 4th Editions ( Newport, Naval War College Press, 2006 ), dan Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, (Berkeley, University of California, 1978), menurut Morgentau kepentingan nasional dibagi dua, yaitu yang bersifat core dan bersifat fleksibel, dapat dilihat dalam Hans J. Morgentau, Politics Among Nations: the Struggle For Power and Peace, 2nd editions, ( New York, Alfred A. Knoph, 1954), hal. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary,* Third Edition, Western Michigan University ( ABL-Clio, California 1980 ), hal 27. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi,* Jakarta, LP3ES, 1990, hal 43. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary,* Third Edition, Western Michigan University ( ABL-Clio, California 1980 ), hal 27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary,* Third Edition, Western Michigan University ( ABL-Clio, California 1980 ), hal 27. [↑](#footnote-ref-15)
16. “Mengapa Saudi Melakukan Intervensi ke Bahrain ?”, <http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengapa-saudi-melakukan-intervensi-ke-bahrain.htm#.UgwPntlwokM> [↑](#footnote-ref-16)
17. “Kaum Syiah Langsungkan Demonstrasi Kecil di Arab Saudi”, <http://www.antaranews.com/print/246814/kaum-syiah-langsungkan-demonstrasi-kecil-di-arab-saudi> [↑](#footnote-ref-17)
18. “Kenapa Arab Saudi Anti Revolusi Timur Tengah”, <http://voiceofpalestine.net/artikel/opini/685-kenapa-arab-saudi-anti-revolusi-timur-tengah.html> [↑](#footnote-ref-18)
19. Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional,* Edisi Revisi, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002. [↑](#footnote-ref-19)
20. Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional,* Edisi Revisi, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal 3. [↑](#footnote-ref-22)